

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021- 2023

Amanda Faustina
Hendarti Tri Setyo Mulyani
Medinal

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e.jurnal@stie-ibek.ac.id

Abstract - This study aims to determine how effective the Motor Vehicle Tax (MVT) Clearance Program is in Increasing Motor Vehicle Tax (PKB) Revenue in Pangkalpinang City in 2021 - 2023. The research method used in this research is qualitative. Primary data is obtained from direct interviews with the Head of the Determination, Bookkeeping, and Reporting Section at UPTB SAMSAT Pangkalpinang City, and secondary data is obtained from UPTB SAMSAT Pangkalpinang City to support the results of the study in order to provide an overview of whether the motor vehicle tax (MVT) clearance program is effective or not in increasing motor vehicle tax revenue in Pangkalpinang City. The results showed that the motor vehicle tax clearance program in Pangkalpinang City was effective in increasing motor vehicle tax revenue.

Keywords : Motor Vehicle Tax Clearance Program and Tax Revenue.

I. PENDAHULUAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi cukup besar bagi pemerintah daerah. Semua pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, masih banyak masyarakat yang belum patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan bermotor yang tidak teregistrasi atau tidak membayar pajak.

Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), salah satunya dengan program pemutihan pajak. Program pemutihan pajak adalah program yang memberikan keringanan atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program pemutihan pajak telah diberlakukan di Kota Pangkalpinang dan juga di daerah lain di Indonesia. Di daerah Kota Pangkalpinang sendiri, Pemerintah Daerah telah melaksanakan program ini dalam 3 tahun terakhir secara beruntun, yaitu pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pangkalpinang memberikan keringanan atau

penghapusan sanksi administratif kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara angsuran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriyani *et al.* (2023) di Kota D, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dimana hal ini juga berdampak pada kenaikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Amirah (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga mengakibatkan kenaikan dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Permasalahan yang mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Masalah ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan bermotor yang tidak teregistrasi atau tidak membayar pajak.

Mengatasi masalah ketidaksadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor adalah hal lain. Manfaat dari pajak kendaraan bermotor dan cara pembayarannya harus dipahami oleh masyarakat. Masyarakat mungkin tidak mengetahui apa itu pajak kendaraan bermotor, bagaimana cara membayarnya, dan apa manfaatnya.

Kepatuhan pajak yang rendah juga bisa disebabkan oleh kesulitan membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah harus melakukan beberapa hal, seperti memperbanyak jaringan pembayaran, mengurangi biaya pembayaran, dan menyederhanakan prosedur pembayaran. Masyarakat mungkin merasa kesulitan untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena lokasi pembayaran yang

jauh, biaya yang mahal, atau proses pembayaran yang berbelit-belit.

Program pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 berhasil meningkatkan proporsi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, skema pemutihan pajak bukanlah jawaban yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah harus melakukan beberapa inisiatif jangka panjang, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat mengenai pajak kendaraan bermotor, dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tujuan dari program pemutihan pajak adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, untuk memaksimalkan inisiatif ini, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut, serta kemudahan dalam prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pangkalpinang.

II. LANDASAN TEORI

Efektivitas

Konsep "efektivitas" berkaitan dengan kapasitas untuk memilih dan mencapai tujuan yang tepat, serta hubungan antara output atau hasil yang diinginkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran, baik untuk individu maupun organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai bentuk atau wujud dari keefektifan. Efektivitas, secara umum, adalah sejauh mana suatu tindakan atau aktivitas mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Martin dan Lubis (1987:56), ada beberapa teknik untuk mengevaluasi efektivitas, antara lain :

1. Pendekatan Objektif
Mengukur tujuan dalam konteks efektivitas dimulai dengan menetapkan tujuan organisasi dan menghitung efisiensi tingkat keberhasilan organisasi dalam memenuhi tujuan tersebut. Dengan demikian, tujuan dari teknik ini adalah untuk menilai seberapa baik organisasi telah berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri.
2. Pendekatan Sumber Daya Sistem
Teknik sumber daya sistem menilai efisiensi dengan cara mengevaluasi kinerja organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Sebuah organisasi harus mampu mendapatkan banyak sumber daya yang dibutuhkannya sambil tetap menjaga ketergantungan sistemnya agar dapat berfungsi secara efisien.
3. Pendekatan Proses Internal
Pendekatan proses melihat efisiensi sebagai kombinasi dari efisiensi internal dan kesehatan organisasi. Metode ini tidak mempertimbangkan lingkungan organisasi, melainkan berfokus pada tindakan yang dilakukan

dengan menggunakan sumber daya organisasi, yang menunjukkan efisiensi dan kesehatan organisasi. Pendekatan proses sering digunakan oleh para pendukung pendekatan non-klasik (hubungan manusia) terhadap teori organisasi, yang berfokus pada hubungan antara efektivitas dan sumber daya manusia.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemutihan pajak adalah program yang menghapuskan atau mengampuni biaya pajak kendaraan yang dibebankan kepada pemilik kendaraan. Pemutihan pajak sering dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang belum sempat membayar pajak kendaraan.

Program pemutihan pajak kendaraan memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pembayar pajak, pemutihan dapat mempermudah pembayaran biaya yang ditaksir karena dendanya biasanya berkurang. Jika Anda tidak membayar pajak kendaraan Anda dalam waktu dua tahun, kendaraan tersebut dapat menjadi bodong.
2. Bagi instansi pemerintah, program pemutihan ini menawarkan beberapa keuntungan, termasuk :
 - a. Penghapusan denda administratif pada saat jatuh tempo, yang memungkinkan wajib pajak untuk hanya membayar pajak dasar sesuai dengan undang-undang daripada harus membayar denda yang besar.
 - b. Membantu mereka yang tidak memiliki waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka.

Setiap daerah mengadakan pemutihan pajak kendaraan pada waktu yang berbeda dan untuk program yang berbeda karena mereka melakukannya secara terpisah. Sebagai contoh, masyarakat di Pangkalpinang telah merespon dengan baik inisiatif pemutihan pajak kendaraan.

Penerimaan Pajak

Uang yang diterima pemerintah dari pajak yang dibayarkan warga negara dikenal sebagai penerimaan pajak. Selama tiga tahun berturut-turut, penerimaan pajak Indonesia telah melampaui targetnya. Berikut ini adalah beberapa pencapaian penerimaan pajak di Indonesia :

1. Dikutip dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) (2023), mengumumkan bahwa, meskipun tingkat pertumbuhan telah kembali normal, penerimaan pajak terus meningkat dengan baik hingga akhir Juli 2023. Hingga akhir Juli 2023, penerimaan pajak negara telah mencapai Rp1.109,1 triliun, atau 64,6% dari target APBN 2023. Penerimaan ini tercatat tumbuh 7,8% secara tahunan.
2. Per 12 Desember 2023, penerimaan pajak telah melampaui target APBN 2023 sebesar 101,3%, atau sebesar Rp 1.739,8 triliun. (CNBC Indonesia, 2023)
3. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp.1.869,2 triliun, atau 102,8 persen dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 atau 108,8 persen dari target APBN. Sejak tahun 2021, penerimaan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan selama tiga tahun berturut-turut. Pencapaian ini tumbuh cukup tinggi sebesar 8,9 persen jika dibandingkan dengan

Rp.1.716,8 triliun yang direalisasikan pada tahun 2022. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Menurut Tommy Saputra Simarmata (2022), jika dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan negara yang lain, penerimaan pajak merupakan sumber yang paling besar. Hal ini dikarenakan membayar pajak merupakan suatu keharusan dan tidak dapat ditunda.

Pajak Kendaraan Bermotor

Kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang memiliki peran penting dalam masyarakat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Menurut Sidharta dan Wati dalam (Mulyawan & Novia, 2016), pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pos pajak yang memegang peranan penting dalam pembangunan karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat memberikan pendapatan asli daerah.

Teori Asas Daya Beli

Kontribusi pajak dirancang untuk mendukung masyarakat. Kontribusi pajak kepada negara difokuskan pada peran pengaturan pajak, yang memastikan keberadaan masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pelaksanaan kepentingan masyarakat yang dipandang sebagai landasan keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu atau negara, sehingga pajak lebih difokuskan pada peran regulasi. Menurut argumen ini, membayar pajak akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Teori Asuransi

Pembayaran premi diperlukan dalam pengaturan asuransi. Premi dimaksudkan sebagai kompensasi atas upaya untuk melindungi individu dari semua kepentingan mereka, seperti keselamatan dan keamanan barang-barang mereka. Masyarakat tampaknya mempercayakan perlindungan dan keamanan hidup mereka kepada negara dengan imbalan pembayaran "premi". Pada kenyataannya, membandingkan pajak dengan premi tidaklah tepat karena jika masyarakat mengalami kerugian, negara tidak dapat memberikan pembayaran seperti halnya perusahaan asuransi.

Teori Daya Pikul

Pendekatan ini didasarkan pada konsep keadilan, yang menyatakan bahwa setiap individu dikenai pajak yang sama. Jumlah pajak yang dibayarkan ditentukan oleh besarnya pendapatan dan pengeluaran seseorang. Kemampuan untuk membayar pajak hanya muncul setelah kebutuhan dasar seseorang terpenuhi. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah istilah yang digunakan dalam pajak penghasilan. Jika seseorang berpenghasilan kurang dari PTKP, maka daya pikulnya tidak ada, dan ia tidak diwajibkan membayar pajak. Filosofi ini menyoroti pentingnya kemampuan dan rasa keadilan seseorang.

Teori Kepentingan

Menurut gagasan kepentingan, negara mempertahankan harta benda dan kehidupan masyarakat dengan mendistribusikan kewajiban yang dibebankan pada masyarakat. Tanggung jawab ini didasarkan pada kepentingan masing-masing individu, yang mencakup pelestarian hidup dan hartanya. Akibatnya, masyarakat

menanggung biaya upaya perlindungan negara. Warga negara yang memiliki uang lebih banyak membayar pajak lebih banyak, sementara mereka yang memiliki kekayaan lebih sedikit membayar pajak lebih sedikit untuk menjaga kepentingan mereka.

Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Gagasan ini mengandaikan bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk memungut pajak. Di sisi lain, masyarakat mengakui bahwa membayar pajak adalah kewajiban untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada negara, karena negara bertanggung jawab untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum pajak didasarkan pada interaksi antara masyarakat dan negara.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati disebut sebagai penelitian kualitatif. Penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara metodelis dan jujur tentang suatu fenomena disebut penelitian deskriptif.

Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Elvinaro Ardianto (2021) dalam bukunya "Metode Penelitian Komunikasi" sebagai penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data deskriptif dan interpretatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang proses sosial, budaya, atau psikologis manusia. Peneliti digunakan sebagai alat penting di lapangan ketika melakukan penelitian kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, dimulai dari bulan Januari 2024 sampai Mei 2024.

Penelitian ini dilakukan di UPTB SAMSAT Kota Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Selindung Baru, Pangkalpinang, Bangka 33118. Website: <https://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2021), data primer adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau oleh mereka yang memerlukannya. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber, dimana narasumber ini merupakan pihak yang bersangkutan di UPTB Samsat Kota Pangkalpinang.

Menurut Sugiyono (2022), data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini yang bersumber dari UPTB Samsat Kota Pangkalpinang adalah data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pangkalpinang selama 3 tahun yaitu tahun 2021-2023.

Desain Penelitian

Desain penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian kualitatif deskriptif adalah desain penelitian yang berusaha menggambarkan secara faktual dan metodis sebuah fenomena.

Variabel dan Indikator Penelitian

Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan variabel penelitian ini. Ukuran atau indikator untuk mengetahui seberapa baik program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dilihat dari jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dihasilkan sepanjang waktu program pemutihan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Berger (dalam Kriyantono, 2020:289), wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek). Menurut Sugiyono (2018:476), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019) berpendapat bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut dalam bukunya "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" :

1. Mengolah data adalah tindakan mengubah data yang diperoleh menjadi data yang dapat dengan mudah dianalisis.
2. Menganalisis data adalah tindakan mengatur dan mengevaluasi data untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena yang sedang dipelajari.
3. Menyajikan hasil analisis adalah proses menyajikan hasil analisis data dalam format yang mudah dipahami dan dimengerti.

Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Prosedur berikut ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan narasumber yang akan diwawancara.
2. Menyusun pedoman wawancara.
3. Melakukan wawancara dengan narasumber.
4. Mengumpulkan dokumen – dokumen yang relevan.
5. Melakukan proses analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Semakin efektif program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan juga pendapatan asli daerah.

Dengan masyarakat membayar pajak kendaraan mereka maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang akan membantu pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur daerah salah satu contohnya adalah pembangunan jalan raya. Dengan adanya program pemutihan ini, masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan juga akan terbantu dengan adanya penghapusan denda sehingga masyarakat juga lebih diringankan dalam membayar pajak kendaraan mereka. Selain itu masyarakat juga akan merasa lebih aman berkendara apabila pajak kendaraan telah dibayar sehingga tidak merasa takut apabila terjadi razia di jalan raya.

Program pemutihan pajak dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan daya bayar masyarakat, seperti halnya asuransi yang membantu individu untuk melindungi diri dari kerugian. Namun, pemutihan pajak tidak memberikan kompensasi atas kerugian seperti yang dilakukan asuransi.

Pemerintah memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini dapat dilihat sebagai bentuk "premi" yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dalam bentuk pengurangan atau penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Dalam pernyataan narasumber, pemerintah memberikan pemutihan pajak untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan. Namun, pemutihan pajak bukanlah solusi jangka panjang dan masyarakat perlu mencari cara lain untuk meningkatkan daya bayar mereka.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor membantu wajib pajak dengan penghasilan rendah untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa membebani kemampuan finansial mereka secara berlebihan.

Program ini memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak berpenghasilan rendah yang mungkin tidak mampu membayar pajak di masa lalu karena berbagai alasan.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kontribusi setiap wajib pajak terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan raya yang digunakan untuk mobilitas wajib pajak sendiri.

Kendaraan bermotor merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melakukan aktivitas ekonomi. Ketidakmampuan menggunakan kendaraan karena tunggakan pajak dapat menghambat aktivitas masyarakat sendiri.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menunggak pajak untuk melunasi kewajiban mereka tanpa dikenakan denda. Hal ini membantu masyarakat untuk kembali menggunakan kendaraan dan melakukan aktivitas ekonomi.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terlambat membayar pajak untuk melunasi kewajibannya

dengan pengurangan sanksi atau pajak yang harus dibayarkan.

Namun program pemutihan pajak juga dapat memiliki dampak negatif, seperti mendorong masyarakat untuk menunda pembayaran pajak di masa depan dengan harapan akan diadakan program pemutihan pajak lagi dan membuat masyarakat tidak terbiasa untuk membayar pajak secara tertib.

Dalam penilaian efektivitas ini penulis menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan objektif, pendekatan sumber daya sistem, dan pendekatan proses internal.

1. Pendekatan Objektif

Tabel 1
Gambar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 - 2023

UPDATING PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN						
UPT DPPKAD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021						
PERIODE PEMUTIHAN PKB : 01 OKTOBER 2021 - 30 DESEMBER 2021						
TARGET	PKB		DENDA PKB		JUMLAH	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
BULAN	60.212.478.600,00		3.138.346.613,00		63.350.825.213,00	
JANUARI	Rp 6.050.324.200	10,05	Rp -	-	Rp 6.050.324.200	9,55
FEBRUARI	Rp 3.563.629.400	5,92	Rp 156.388.100	4,98	Rp 3.720.017.500	5,87
MARET	Rp 3.807.496.500	6,32	Rp 212.386.700	6,77	Rp 4.019.883.200	6,35
APRIL	Rp 3.878.157.800	6,44	Rp 253.094.200	8,06	Rp 4.131.252.000	6,52
MEI	Rp 3.419.189.900	5,68	Rp 172.930.700	5,51	Rp 3.592.120.600	5,67
JUNI	Rp 3.899.699.600	6,48	Rp 232.113.700	7,40	Rp 4.131.813.300	6,52
JULI	Rp 4.064.994.400	6,75	Rp 249.095.000	7,94	Rp 4.314.089.400	6,81
AGUSTUS	Rp 3.893.895.900	6,47	Rp 170.047.000	5,42	Rp 4.063.942.900	6,41
SEPTEMBER	Rp 3.968.012.800	6,59	Rp 158.986.700	5,07	Rp 4.126.999.500	6,51
OKTOBER	Rp 5.228.975.700	8,68	Rp -	-	Rp 5.228.975.700	8,25
NOVEMBER	Rp 5.327.156.600	8,85	Rp -	-	Rp 5.327.156.600	8,41
DESEMBER	Rp 7.601.928.300	12,63	Rp 5.761.400	0,18	Rp 7.607.689.700	12,01
JUMLAH	Rp 54.703.461.100	90,85	Rp 1.610.803.500	51,33	Rp 56.314.264.600	88,89

UPDATING PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN						
UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022						
PERIODE PEMUTIHAN PKB : 25 APRIL 2022 - 29 JULI 2022						
TARGET	PKB		DENDA PKB		JUMLAH	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
BULAN	62.706.930.600,00		2.953.903.500,00		65.660.834.100,00	
JANUARI	Rp 3.944.484.800	6,29	Rp 153.393.600	5,19	Rp 4.097.878.400	6,24
FEBRUARI	Rp 3.201.165.600	5,10	Rp 121.859.700	4,13	Rp 3.323.025.300	5,06
MARET	Rp 4.089.638.800	6,52	Rp 227.718.600	7,71	Rp 4.317.357.400	6,58
APRIL	Rp 4.442.946.600	7,09	Rp 199.232.400	6,74	Rp 4.642.179.000	7,07
MEI	Rp 4.123.435.800	6,58	Rp -	-	Rp 4.123.435.800	6,28
JUNI	Rp 4.772.714.392	7,61	Rp -	-	Rp 4.772.714.392	7,27
JULI	Rp 5.737.264.875	9,15	Rp -	-	Rp 5.737.264.875	8,74
AGUSTUS	Rp 4.173.790.650	6,66	Rp 213.106.600	7,21	Rp 4.386.897.250	6,68
SEPTEMBER	Rp 4.141.119.200	6,60	Rp 207.778.300	7,03	Rp 4.348.897.500	6,62
OKTOBER	Rp 4.409.206.500	7,03	Rp 227.671.000	7,71	Rp 4.636.877.500	7,06
NOVEMBER	Rp 4.892.681.625	7,80	Rp 112.848.300	3,82	Rp 5.005.529.925	7,62
DESEMBER	Rp 6.658.812.325	10,62	Rp 83.401.600	2,83	Rp 6.742.213.925	10,27
JUMLAH	Rp 54.587.261.167	87,05	Rp 1.547.210.000	52,38	Rp 56.134.471.167	85,49

UPDATING PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN						
UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023						
PERIODE PEMUTIHAN PKB : 18 AGUSTUS 2023 - 18 DESEMBER 2023						
TARGET	PKB		DENDA PKB		JUMLAH	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
BULAN	73.239.369.500,00		2.964.331.500,00		76.203.701.000,00	
JANUARI	Rp 5.901.159.275	8,06	Rp 270.735.300	9,13	Rp 6.171.894.575	8,10
FEBRUARI	Rp 11.572.785.575	15,80	Rp 571.850.900	19,29	Rp 12.144.636.475	15,94
MARET	Rp 17.531.928.700	23,94	Rp 860.638.800	29,03	Rp 18.392.567.500	24,14
APRIL	Rp 22.772.659.900	30,95	Rp 1.089.068.800	36,74	Rp 23.861.728.700	30,79
MEI	Rp 28.537.890.175	38,97	Rp 1.426.535.500	48,12	Rp 29.964.425.675	39,32
JUNI	Rp 34.047.049.175	46,49	Rp 1.694.342.200	57,16	Rp 35.741.391.375	46,90
JULI	Rp 40.416.317.675	55,18	Rp 2.053.613.800	69,28	Rp 42.469.931.475	55,73
AGUSTUS	Rp 47.488.421.875	64,84	Rp 2.214.513.400	74,71	Rp 49.702.935.275	65,22
SEPTEMBER	Rp 55.293.347.608	75,50	Rp -	-	Rp 55.293.347.608	72,56
OKTOBER	Rp 64.100.612.258	87,52	Rp -	-	Rp 64.100.612.258	84,12
NOVEMBER	Rp 70.174.074.958	95,81	Rp -	-	Rp 70.174.074.958	92,09
DESEMBER	Rp 78.219.113.358	106,80	Rp 2.324.940.600	78,43	Rp 80.544.053.958	105,70
JUMLAH	Rp 475.655.360.532	649,45	Rp 12.506.235.300	421,89	Rp 488.161.595.832	640,60

Sumber : UPTB SAMSAT Kota Pangkalpinang

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTB SAMSAT Kota Pangkalpinang, dapat dilihat bahwa pada bulan – bulan periode program pemutihan pajak terdapat kenaikan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan bulan - bulan biasa tanpa adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, dapat dilihat pada bulan Desember selama 3 tahun terakhir selalu menjadi bulan dengan pendapatan tertinggi pajak kendaraan bermotor. Hal ini dipengaruhi oleh adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun dan banyaknya registrasi kendaraan masuk pada akhir tahun.

Tabel 2
Gambar Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Program Pemutihan Tahun 2021 – 2023

UPDATING PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN						
UPT DPPKAD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021						
PERIODE PEMUTIHAN PKB : 01 OKTOBER 2021 - 30 DESEMBER 2021						
TARGET	PKB		DENDA PKB		JUMLAH	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
BULAN	60.212.478.600,00		3.138.346.613,00		63.350.825.213,00	
OKTOBER	Rp 5.228.975.700	8,68	Rp -	-	Rp 5.228.975.700	8,25
NOVEMBER	Rp 5.327.156.600	8,85	Rp -	-	Rp 5.327.156.600	8,41
DESEMBER	Rp 7.601.928.300	12,63	Rp 5.761.400	0,18	Rp 7.607.689.700	12,01
JUMLAH	Rp 18.158.060.600	30,16	Rp 5.761.400	0,18	Rp 18.163.822.000	28,67

UPDATING PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN						
UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022						
PERIODE PEMUTIHAN PKB : 25 APRIL 2022 - 29 JULI 2022						
TARGET	PKB		DENDA PKB		JUMLAH	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
BULAN	62.706.930.600,00		2.953.903.500,00		65.660.834.100,00	
MEI	Rp 4.123.435.800	6,58	Rp -	-	Rp 4.123.435.800	6,28
JUNI	Rp 4.772.714.392	7,61	Rp -	-	Rp 4.772.714.392	7,27
JULI	Rp 5.737.264.875	9,15	Rp -	-	Rp 5.737.264.875	8,74
JUMLAH	Rp 14.633.415.067	23,34	Rp -	-	Rp 14.633.415.067	22,29

UPDATING PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN						
UPT BAKUDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023						
PERIODE PEMUTIHAN PKB : 18 AGUSTUS 2023 - 18 DESEMBER 2023						
TARGET	PKB		DENDA PKB		JUMLAH	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
BULAN	73.239.369.500,00		2.964.331.500,00		76.203.701.000,00	
SEPTEMBER	Rp 55.293.347.608	75,50	Rp -	-	Rp 55.293.347.608	72,56
OKTOBER	Rp 64.100.612.258	87,52	Rp -	-	Rp 64.100.612.258	84,12
NOVEMBER	Rp 70.174.074.958	95,81	Rp -	-	Rp 70.174.074.958	92,09
JUMLAH	Rp 189.568.034.824	258,83	Rp -	-	Rp 189.568.034.824	248,76

Sumber : UPTB SAMSAT Kota Pangkalpinang

Pada tahun 2023, penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat cukup signifikan dari tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan loket baru pada tahun 2023 yaitu loket SAMSAT yang berlokasi di Transmart.

Dapat disimpulkan bahwa program pemutihan kendaraan bermotor efektif dalam menaikkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di UPTB SAMSAT Kota Pangkalpinang.

2. Pendekatan Sumber Daya Sistem

Program pemutihan pajak membantu SAMSAT meningkatkan pendapatan dan efisiensi proses pelayanan dengan cara :

- Meningkatkan Efisiensi Penagihan Pajak
Program ini memungkinkan SAMSAT untuk fokus pada penagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh, karena wajib pajak yang menunggak pajak telah terdorong untuk melunasi pajaknya melalui program pemutihan.
- Menambah Sumber Daya Manusia dan Peralatan SAMSAT menambah personel dan memastikan peralatan seperti komputer dan printer dalam kondisi prima untuk melayani lonjakan pada masa pemutihan. Hal ini menunjukkan komitmen SAMSAT untuk meminimalisir hambatan dan mempercepat proses pelayanan.
- Memperpanjang Jam Layanan SAMSAT memperpanjang jam layanan pada hari-hari terakhir program pemutihan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan memaksimalkan waktu pelayanan.

Peningkatan pendapatan menunjukkan bahwa program pemutihan pajak membantu SAMSAT memperoleh sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya.

Peningkatan efisiensi proses pelayanan menunjukkan bahwa SAMSAT memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

3. Pendekatan Proses Internal

Pendekatan proses membantu kita memahami bagaimana program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efisien dan meningkatkan kesehatan organisasi.

Berdasarkan narasumber, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pemutihan ini adalah :

a. Penurunan Jumlah Tunggakan Kendaraan Bermotor

b. Peningkatan Antusiasme Masyarakat

c. Peningkatan Transaksi per Hari

Penurunan tunggakan pajak dan peningkatan antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa program pemutihan telah meningkatkan efisiensi internal SAMSAT. Hal ini terlihat dari meningkatnya pendapatan dari penerimaan pajak.

Keberhasilan program pemutihan dalam meningkatkan kepatuhan dan antusiasme masyarakat menunjukkan dampak positif terhadap kesehatan organisasi UPTB SAMSAT Kota Pangkalpinang. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan citra positif organisasi.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kota Pangkalpinang sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Adapun beberapa indikator yang dapat menunjukkan efektivitas penerimaan pajak adalah :

1. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor pada periode program pemutihan pajak dibandingkan dengan periode tanpa pelaksanaan program pemutihan pajak. Hal ini dilihat dari meningkatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor pada periode pelaksanaan program pemutihan pajak selama 3 tahun yaitu 2021 - 2023.
2. Menurunnya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dipengaruhi oleh minat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam program pemutihan pajak ini, dimana manfaat dari program salah satunya pajak kendaraan bermotor wajib pajak yang sudah tertunggak selama beberapa tahun dihapuskan beserta dengan dendanya sehingga mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.
3. Meningkatnya antusiasme masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada masa program pemutihan pajak kendaraan bermotor dibandingkan pada hari – hari biasa tanpa adanya program pemutihan pajak.

Saran

Atas dasar dari kesimpulan akhir penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengadakan program edukasi tentang pajak kendaraan bermotor secara berkala kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Bagi UPTB SAMSAT Kota Pangkalpinang
Perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan spanduk.
Mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran online dan melalui ATM.
Meningkatkan kualitas pelayanan di SAMSAT. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM dan peralatan, serta memperpendek waktu tunggu.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan dan referensi untuk mendalami penelitian selanjutnya dengan menggunakan program yang berbeda, metode penelitian yang berbeda, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1]. Apriyani, R., Amirah, A., & Rahayu, C. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Brebes). *Jurnal Revenue*, 1(2), 1-16.
- 2]. Mulyawan, A., & Novia, N. (2016). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 1-10.
- 3]. Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Brebes). *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 1–14.
- 4]. Simarmata, T. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 1-16.
- 5]. Elvinaro Ardianto. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- 6]. Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- 7]. Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi 7. Yogyakarta: Andi.
- 8]. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- 9]. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- 10]. Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- 11]. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- 12]. CNBC Indonesia." Segini Uang Pajak Warga RI Selama 2023".(2023).<https://www.cnbcindonesia.com/research/20231227040329-128-500402/segini-uang-pajak-warga-ri-selama-2023>
- 13]. Gramedia."Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya". (2021). <https://www.gramedia.com/literasi/teoriefektivitas/>
- 14]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hatrick, Tiga Kali Berturut-turut".(2024). <https://www.kemenkeu.go.id/informasipublik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- 15]. Kompas."Pengertian Efektivitas Menurut Ahli".(2023). <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli>
- 16]. Liputan 6."Pengertian Efektivitas adalah Unsur Mencapai Tujuan, Ketahui Ukurannya". (2022). <https://www.liputan6.com/hot/read/4870774/pengertian-efektivitas-adalah-unsur-mencapai-tujuan-ketahuiukurannya?page=2>
- 17]. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia."Hingga Akhir Juli 2023, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun". (2023). <https://setkab.go.id/hingga-akhir-juli-2023-penerimaan-pajak-tembus-rp1-1091triliun/>